

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Papua termasuk kedalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia pada bagian Indonesia Timur. Sebagian rakyat Papua hingga hari ini masih memperjuangkan nasibnya sendiri yakni untuk mendirikan suatu negara baru.¹ Republik Vanuatu dengan konsistensinya memberikan dukungan bagi Organisasi Papua Merdeka menjadi satu – satunya negara anggota organisasi kawasan MSG yang menginginkan adanya pemisahan diri Papua dari Indonesia.² *Melanesian Spearhead Group* (MSG) menjadi organisasi yang menaungi Vanuatu serta negara Pasifik Selatan lainnya seperti Fiji, PNG, *New Caledonia*, dan Kepulauan Solomon.³ Vanuatu sebagai negara dengan pengaruh dari adanya sistem pemerintahan bekas jajahan Perancis juga Inggris karena sebelumnya mengalami dualisme penjajahan negara - negara Eropa tersebut.⁴ Vanuatu sendiri baru meraih kemerdekaannya tahun 1980.⁵

¹ Kusuma, Ayu Dien. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia Bergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Terkait Dengan Separatis Papua.

² Rianda, B., Djemat, Y.O., & Rahmat, A.N. (2017). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu, *Dinamika Global*, 02 diakses melalui <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>

³ *Ibid.*

⁴ Zahidi, M. S. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia, *MANDALA : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 3 No. 1 diakses melalui www.kontekstual.com

⁵ *Ibid.*

Vanuatu memberikan pernyataan berupa dukungan untuk Papua melalui pemboikotan tanggal 16 Januari 2014 dengan agenda organisasi MSG datang ke Negara Indonesia.⁶ Vanuatu melalui menteri luar negerinya yaitu Edward Natapei menyatakan kesediaan sebagai perwakilan MSG apabila terdapat suatu kesempatan menjumpai *indigenous people* serta agamawan mayoritas masyarakat Kristen disana memiliki pandangan akan dampak pelanggaran serangkaian permasalahan HAM yang terjadi di Provinsi Papua.⁷ Terdapat penyampaian pidato PM Vanuatu yaitu Moana Kalosil di Jenewa tentang kondisi memprihatinkan di Papua selain permasalahan seputar boikot agenda MSG ke Indonesia.⁸ Moana Kalosil mengungkapkan sejak ketidakadilan tahun 1969 di Papua luput dari perhatian Internasional bahwa ia sangat memiliki fokus akan hal tersebut.⁹ Terlebih lagi dengan ketidakadilan yang berlangsung di Papua tersebut, warta mancanegara hingga LSM internasional ingin melakukan kunjungan kesana.¹⁰ Masyarakat Melanesia menjadi korban dari perang dingin akan perebutan energi hingga SDA di Papua menurut PM Vanuatu.¹¹

⁶ Potensi Kerjasama Penanggulangan Bencana Di Kawasan MSG (*Melanesian Spearhead Group*) Ke BNPB 12 Januari 2014, 2014, dalam <https://bnpb.go.id/berita/potensi-kerjasama-penanggulangan-bencana-di-kawasan-negara-negara-msg-melanesian-spearhead-group-ke-bnpb-12-januari-2014>

⁷ Vanuatu, Negara Kecil yang Dukung Kemerdekaan Papua. (2020). Dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200928075602-113-551633/vanuatu-negara-kecil-yang-dukung-kemerdekaan-papua>

⁸ ABC News. (2014).

⁹ Thomas Bagus Putera Temaluru. (2016). Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 2.

¹⁰ *Free West Papua*. (2014)

¹¹ Kompas. (2020). DiingatkaN Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua Papua di Sidang PBB dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/133200465/diingatkaN-jangan-ikut-campur->

Vanuatu kemudian aktif membawa isu Papua merdeka kepada komite Dekolonisasi PBB di New York tahun 2017 hingga tahun 2020 sejak penyerahan petisi berisi referendum berisikan 1,8 juta suara penduduk Papua Barat.¹² Klaim atas kendaraan politik seluruh rakyat Papua, telah melakukan berbagai upaya di level lembaga dunia menjadi jalur dari eksistensi MSG.¹³ Isu tersebut kembali mengangkat permasalahan di Papua Barat tentang kejahatan kemanusiaan disana. Anggapan mengenai Indonesia melakukan pembungkaman penduduk Papua Barat atas kejahatan kemanusiaan yang berlangsung disana selama ini dialamatkan oleh Vanuatu.¹⁴ Namun anggapan Vanuatu tersebut sempat dibantah oleh Indonesia dalam pendapatnya melalui sidang PBB secara bersamaan. Tanggapan Indonesia kembali menerangkan bahwa Vanuatu serta keenam negara Melanesia lain sudah melanggar catatan perubahan PBB No. 2504 tahun 1969 tepatnya tanggal 16 November. Bahwa menurut Hukum Internasional Papua merupakan wilayah yang telah diakui secara sah masuk kedalam kedaulatan wilayah Negara Indonesia.¹⁵

Isu Papua Merdeka telah mengalami penginternasionalan dengan dukungan Vanuatu. Internasionalisasi yang dilakukan Vanuatu seperti menyampaikan aspirasi yang mengatasnamakan pembebasan Papua melalui

sudah-beberapa-kali-vanuatu-singgung-isu?page=all

¹² BBC. (2019). Upaya Internasionalisasi Papua : 'Negara – negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia' dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498660>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sanjaya, Rudi. (2016). Pelanggaran HAM di Papua di Ungkit kembali disidang PBB ke-71 dalam www.rappler.com

¹⁵ Dalam <http://repository.unjani.ac.id/repository/5adb7049e255c7f447a306884c633c8b.pdf>

berbagai pertemuan oleh organisasi internasional. Kumpulan Perdana Menteri pendukung kemerdekaan bagi Papua diantaranya yaitu Moana Kalosil. Sejak tahun 2013 dalam pertemuan para pimpinan MSG di Kaledonia Baru agenda mengenai keanggotaan Papua MSG disampaikan oleh Joe Natuman. Perdana Menteri negara Vanuatu tersebut pada tahun 2014 memberikan dukungan kepada Papua agar negaranya mendukung secara hukum hal tersebut guna tercapainya kemerdekaan wilayah Papua. Ia menambahkan dengan adanya demonstrasi yang terjadi di PBB rasa syukur atas dukungannya pada kemerdekaan Papua semakin bertambah. Perdana Menteri Vanuatu lainnya ialah Edward Natapei yang turut mendukung kemerdekaan Papua. Sejak tahun 2013 melalui pertemuan para pemimpin negara MSG dengan agenda keputusan proposal *West Papua National Coalition Liberation (WPCNL)* bahwa ia ingin membahas soal Papua Barat namun mengalami kendala *voting*. Edward Natapei mengatakan “PNG serta Fiji dan Kepulauan Solomon punya pandangan yang sama tentang undangan Indonesia. Vanuatu dan FLNKS yang berbeda. Kami kalah jumlah”.¹⁶ Sejak tahun 1960an wilayah Papua selalu mendapatkan tempat bagi penyampaian atas ketidakadilan serta kejahatan kemanusiaan atas masyarakatnya. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia dengan jumlah korban tidak sedikit pada masyarakatnya.

¹⁶ RNZ. (2014). *Vanuatu PM reaffirms West Papua position to Jakarta* dalam <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/252008/vanuatu-pm-reaffirms-west-papua-position-to-jakarta>



Lampiran Gambar 1.1. Pengiriman Ketua ULMWP Benny Wenda atas dukungan Vanuatu sebagai delegasinya, diakses melalui [youtube.com/VOA News](https://www.youtube.com/VOA News)

Terselenggaranya penulisan dalam penelitian yang dilakukan penulis, pertama – tama berkat adanya beberapa literatur percontohan dan sumber inspirasi serta informasi bagi penulis. Seperti pada penulisan prasyarat kelulusan sarjana oleh Tabitha Yemima Joselina mengenai “Analisis Kepentingan Vanuatu dan Australia dalam Internasionalisasi Isu Papua.” Tabitha membahas kepentingan Vanuatu dan Australia dibalik upaya pembawaan isu Papua merdeka hingga forum internasional memiliki kepentingan keamanan (*Hard Power : Power Distribution*) seperti perluasan kekuatan regional serta adanya ancaman stabilitas keamanan di kawasan Pasifik Selatan. Vanuatu merupakan pihak sekutu dalam kemerdekaan separatis Papua dan Australia turut campur kehadirannya

pernah memiliki sejarah sebagai penjaga keamanan di kawasan tersebut dengan turut melakukan intervensi beberapa konflik yang terjadi disana.

Adanya beberapa literatur percontohan dan sumber inspirasi serta informasi bagi penulis lainnya yaitu oleh TBP Temaluru yang berjudul “Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua” periode penulisan penelitian yang dilakukannya antara 2013 sampai tahun 2015. Vanuatu melakukan upaya isu separatisme Papua melalui berbagai organisasi internasional seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG) hingga forum internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa dengan kepentingan ekonomi (*Hard Power*).

Tinjauan pustaka ketiga yang dapat menjadi penunjang penulisan penelitian penulis berikut yaitu penelitian dari G.N. Syah P, T. Legionosuko, dan Adnan M yang berjudul “Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara – Negara Anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG) Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui Studi Kasus Vanuatu”. Putra, Legionosuko, Madjid membahas kepentingan Vanuatu dibalik upaya pembawaan isu Papua merdeka hingga forum internasional memiliki kepentingan ideologis melalui propaganda permasalahan yaitu hak asasi manusia, sistem pemerintahan Vanuatu, rusaknya lingkungan, dan kesamaan etnis serta.

Kemudian tinjauan pustaka keempat adalah penelitian dari Adriana Elisabeth yang berjudul “Dimensi Internasional Kasus Papua”. Elisabeth membahas kepentingan Vanuatu melakukan serangkaian upaya akhirnya membawa isu separatisme Papua ini menuju berbagai organisasi internasional

seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG) hingga forum internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa dengan kepentingan ekonomi dan politik (*Hard Power*). Dimana tulisan ini memaparkan peran forum regional mengangkat isu berupa Pepera, ras Melanesia, hingga permasalahan mengenai *environmentalism*.

Keempat penelitian diatas memiliki persamaan dimana keseluruhannya membahas mengenai internasionalisasi isu separatisme Papua oleh Vanuatu. Kemudian keempat penelitian ini juga sama – sama menekankan bagaimana isu separatisme Papua mendapatkan dukungan masyarakat internasional sebagai salah satu implementasi kepentingan ideologis. Pada penelitian ketiga dan keempat diatas spesifik membahas bagaimana peranan Vanuatu dalam memainkan isu Papua merdeka melalui propaganda sebagaimana penulis turut mengangkatnya. Perbedaan penelitian – penelitian tersebut dengan penelitian penulis berikut terletak pada periode pembatasan waktu terjadinya permasalahan. Waktu terjadinya permasalahan diatas tahun 2015 sedangkan penelitian penulis pada 2017 – 2020. Pada persamaanya ialah menggunakan kepentingan nasional Vanuatu melakukan internasionalisasi isu Papua merdeka.

Riset tentang kepentingan Vanuatu dalam upaya internasionalisasi isu Papua merdeka sangat luas, tetapi tidak ada penelitian yang menekankan pada penggunaan asing sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Sebagai capaian yang penulis ingin raih yaitu meneliti instrumen Vanuatu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Vanuatu menggunakan isu Papua merdeka sebagai instrumen untuk

membangun kebijakan luar negeri untuk mempertahankan status quo, yaitu untuk memisahkan Papua dari wilayah kedaulatan NKRI dan untuk mengakui Papua Barat sebagai bagian dari ras Melanesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai dasar dari pemaparan latar belakang sebelumnya timbul pertanyaan permasalahan berikut yaitu **“Apa Kepentingan Vanuatu Dalam Melakukan Upaya Internasionalisasi Isu Papua Merdeka Tahun 2017 – 2020 ? ”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional bagi khalayak umum hingga akademisi melalui karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memenuhi syarat gelar strata 1/ sarjana program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas adalah untuk mengetahui *Kepentingan Vanuatu Dalam Upaya Internasionalisasi Isu Papua Merdeka Tahun 2017 - 2020.*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menjadikan hasil dari penelitian yang berjudul *Kepentingan Vanuatu Dalam Upaya Internasionalisasi Isu Papua Merdeka Tahun 2017 - 2020* menjadi landasan pengembangan dan penerapan ilmu hubungan internasional secara lebih lanjut khususnya dalam kajian keamanan internasional, seperti separatisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam ilmu pengetahuan ilmiah serta dalam membantu penelitian – penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Empirik

Manfaat secara empirik dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, universitas, peneliti dan semua elemen masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 *National Interest* (Kepentingan Nasional)

Dalam penelitian ini pendekatan utama yang digunakan penulis ialah mengenai *National Interest* dengan konsep pembentukan sebuah kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional ialah kemampuan

minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.¹⁷ Melalui pemaparan Morgenthau selanjutnya para pemimpin suatu negara menurunkan kebijakan yang spesifik terhadap negara lain sifatnya memiliki unsur kerjasama atau konflik.

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton merupakan tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi umum yang dapat dikatakan merupakan sebuah kebutuhan sangat vital bagi sebuah negara. Unsur tersebut memiliki cakupan seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut juga memiliki arti bahwa kasus politik luar negeri, bisa menjadi salah satu permasalahan kelangsungan hidup, ancaman keamanan, ekonomi, maupun politik suatu negara atau bangsa.

Melalui pendekatan berikut selanjutnya terdapat unsur fundamental didalamnya, yaitu kepentingan nasional bersifat *vital* atau esensial serta kepentingan yang bersifat non – *vital* atau sekunder.¹⁸ Pada kepentingan bersifat *vital* dijelaskan bahwa kepentingan digunakan apabila negara dalam keadaan mendesak dan harus segera mengambil keputusan.¹⁹ Kepentingan bersifat vital seperti perlunya suatu negara melindungi kedaulatannya, mempertahankan wilayahnya, serta harga diri

¹⁷ Trahastadie, A. (t.t). UNIKOM Repository diakses melalui https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1902/8/UNIKOM_Senno%20Ariga%20Trahastadie_Bab%20II.pdf

¹⁸ Jemadu. (2008) p 67-69.

¹⁹ Jemadu. (2008)

negaranya tersebut.²⁰ Sedangkan pada kepentingan bersifat non – vital perbedaannya terletak pada proses yang memakan waktu lama disertai dengan hasil dan fungsi dalam skala waktu panjang.²¹ Seperti dikutip dalam Jurnal Joseph S. Nye Jr. dengan judul *Redefining The National Interest* yaitu :

“In a democracy, the national interest is simply the set of shared priorities regarding relations with the rest of the world. It is broader than strategic interests, though they are part of it. It can include values such as human rights and democracy, if the public feels that those values are so important to its identity that is willing to pay a price to promote them.”

Kepentingan bersifat non – vital seperti kepentingan dari masyarakat guna memprioritaskan keselamatan masyarakat.²² Melindungi daerah – daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai - nilai hidup yang dianut suatu negara (identitas) merupakan beberapa contoh dari *core/basic/vital interest* berikut.²³

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan – tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita – citakan.²⁴ Dalam hal ini kepentingan yang dimaksud relatif serupa diantara semua negara atau bangsa yaitu keamanan yang juga mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya, kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar rumusan ketetapan

²⁰ Oppenheim. (1987)

²¹ *Ibid.*

²² Oppenheim. (1987)

²³ Yani, Yanyan Mochamad Drs. (2007). Disampaikan dalam Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AU (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007.

²⁴ Rudy. (2002)

kepentingan nasional bagi setiap negara tersebut.²⁵

Dalam merumuskan suatu kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas suatu negara tersebut dalam membentuk apa yang disebut sebagai kekuasaan (*power*).²⁶ Bentuk kapabilitas dari *power* tersebut memiliki sifat statis, sedangkan bila melihat interaksi antar negara serta berbagai perilakunya maka akan diperoleh dengan definisi *power* yang berifat dinamis. Kapabilitas bersifat dinamis tersebut dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya.²⁷ Ketahanan nasional didasarkan pada kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.²⁸

1.5.1.2 Identitas Kolektif

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah Konstruktivisme Sistemik (*Systemic Constructivism*) dari Alenxander Wendt dengan konsep bahwa politik domestik dan aturannya yang mengubah identitas dan kepentingan mereka sendiri. Pada sejarahnya di Jerman, sejumlah pakar seperti Nicolas Onuf dan Friedrich Kratochwil memperkenalkan Teori Konstruktivis (*Constructivist Theory*) yang menyatakan bahwa hubungan antar aktor

²⁵ Rudy. (2002)

²⁶ Trahastadie. (2019) dalam

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1902/8/UNIKOM_Senno%20Ariga%20Trahastadie_Bab%20II.pdf

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rudy. (2002). Hal. 16

internasional tidak hanya dibentuk oleh “kepentingan” (*interest*), tetapi juga oleh unsur – unsur penting lainnya, yakni “maksud” (*intention*), “identitas” (*identity*) dan “bahasa” (*language*).²⁹ Hubungan antar aktor A dan aktor B merupakan proses sejarah panjang yang melibatkan empat faktor tersebut sekaligus.³⁰ Semakin intensif interaksi diantara empat faktor tersebut, maka hubungan tersebut akan mengarah pada pertemanan (*friendship*).³¹ Namun sebaliknya, apabila konstruksi yang buruk akan menghasilkan rivalitas (*rivalry*).³² Teori konstruktivisme mengandalkan pada proposisi bahwa: proksimitas (kedekatan) dalam hal identitas, kepentingan, niat, dan bahasa akan membentuk hubungan persahabatan, sedangkan perbedaan yang terlalu tajam dalam keempat hal tersebut cenderung membentuk hubungan rivalitas bahkan permusuhan.

Seperti halnya Nicholas Onuf, Kratochwil memandang konstruktivisme berpusat pada “praktik” (*practices*) yang didasarkan aturan dan norma.³³ Sistem politik (termasuk sistem internasional) diubah melalui praktik para aktor. Karena itu perubahan fundamental dari sistem internasional terjadi ketika para aktor, melalui praktik mereka, mengubah aturan (*rules*) dan norma (*norms*) yang mengatur interaksi internasional.³⁴ Hal ini terjadi apabila keyakinan dan identitas domestik para aktor diubah serta dengan aturan dan norma yang mengatur jalannya

²⁹ Hadiwinata, B. S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama. Kencana.

³⁴ Richard N. Lebow dan Thomas Risse-Kappen (eds.), *International Relations Theory and the Ends of the Cold War*, (New York, Columbia University Press, 1955).

praktik politik mereka. Dalam pandangan kaum Konstruktivis, negara tidak sama sekali memiliki kepentingan bawaan (*given interest*) karena negara terkungkung oleh struktur sosial yang normatif.³⁵ Bahkan negara dianggap tidak mungkin *exist*.

Dengan demikian identitas negara terkonstruksi oleh norma membuat perubahan pada rekonstruksi identitas. Dengan demikian maka kepentingan pun berubah sejalan dengan hal tersebut hingga akhirnya akan merubah kebijakan negara. Kaum Konstruktivis lebih lunak pada kepentingan negara, sebab mereka percaya bahwa perubahan identitas akan berpengaruh pada perubahan kepentingan negara yang kesemuanya sejalan dengan perubahan – perubahan struktur normatif.³⁶

Alexander Wendt mendeskripsikan empat jenis identitas dalam hubungan internasional.³⁷ Identitas pertama yaitu identitas personal fisik dimana identitas suatu aktor terbentuk secara alamiah seperti contohnya bentuk fisik, lambang negara, nasionalisme dan lain – lain.³⁸ Identitas kedua yaitu identitas tipe yang dipengaruhi kategori tertentu seperti ideologi politik dan agama.³⁹ Identitas ketiga yaitu identitas peran yang memfokuskan kedudukan atau posisi aktor dalam hubungan internasional.⁴⁰ Identitas berikut baru akan terbentuk apabila aktor yang bersangkutan melakukan suatu aktifitas hubungan internasional dengan aktor lain

³⁵ Rachmawati, Iva. (2012). Konstruktivisme Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Hubungan Internasional.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wendt. (1992). Pp 224 – 229.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

dan mendapatkan tanggapan.⁴¹ Jenis identitas tersebut memiliki hubungan dengan pembentukan identitas menjadi kebijakan luar negeri sebagaimana dikemukakan Holsti dalam jurnalnya berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*”.⁴² Terbentuknya kebijakan luar negeri suatu aktor dipengaruhi oleh faktor internal (unsur negara, opini publik, dan lainnya) dan faktor eksternal (nilai dan norma internasional, opini dari aktor lainnya, dan lain – lain).⁴³ Apabila digabungkan, selanjutnya akan terlihat apa posisi suatu aktor dan bagaimana aktor tadi seharusnya bertindak dalam hubungan internasional.⁴⁴

Identitas terakhir menurut Wendt yaitu identitas kelompok (*collective identity*).⁴⁵ Jenis identitas berikut terbentuk ketika suatu kelompok yang berisikan sekumpulan anggota negara saling berhubungan hingga pada akhirnya membentuk suatu identitas yang dimiliki bersamaan karena bergabung dengan kelompok tersebut.⁴⁶ Hubungan antar aktor negara bisa terjadi karena saling ketergantungan atau karena rasa solidaritas yang tinggi.⁴⁷

Wendt memaparkan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi identitas kolektif suatu aktor.⁴⁸ Faktor pertama yaitu faktor sistemik atau faktor interaksi

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Holsti, K.J. (1970). *National Role Conceptions in the Study of Foreign*

⁴³ Von Gaserfeld, Ernst. (n,n). “An Introduction of Radical Constructivism”.

⁴⁴ Rachmawati, Iva. (2012). *Konstruktivisme Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Hubungan Internasional*.

⁴⁵ *Ibid.*

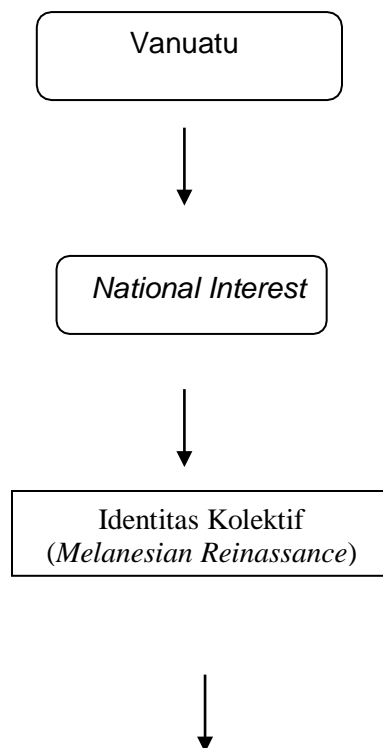
⁴⁶ Wendt. (1992). Pp 224 – 229.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wendt. (1992). Pp 224

antar negara.⁴⁹ Faktor kedua yaitu faktor struktural atau faktor intersubjektivitas antar Negara.⁵⁰ Identitas kolektif kemudian baru terbentuk bila dua atau lebih negara saling mengidentifikasi satu sama lain sebagai kawan. Faktor terakhir yaitu faktor strategis atau faktor komunikasi antarnegara.⁵¹ Negara yang bersikap ramah kepada negara lainnya tentu akan mendapatkan tanggapan positif dan timbulnya rasa solidaritas satu sama lain.⁵²

1.6 Sintesa Pemikiran



⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wendt. (1992). Pp 224 – 229.

⁵² Wendt. (1992). Pp 224



Dengan pemaparan gambar skema diatas, Vanuatu menjalankan *national interest* mereka sebagai salah satu aktor internasional berupa negara, dengan membawa isu Papua merdeka kedalam setiap forum internasional seperti pertemuan tinggi para pemimpin negara MSG dan sidang PBB. Implementasi *national interest* tersebut direalisasikan melalui pembentukan kebijakan luar negeri mereka guna mengkampanyekan politik Papua merdeka kepada negara – negara Pasifik lainnya atas dasar *Melanesian Reinassance* atau kesamaan etnis Melanesia. Selaras dengan hal tersebut, melalui kebijakan luar negeri Vanuatu kemudian menjadi bentuk propaganda sebagai alat terwujudnya aspirasi kelompok – kelompok kepentingan yang pro terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Wujud serta capaian kepentingan nasional Vanuatu dalam melakukan internasionalisasi isu Papua merdeka menjadi tolak ukur bagi penulis.

1.7 Argumentasi Utama

Atas dasar identitas kolektif negara – negara Melanesia melalui propaganda kesamaan ras Melanesia *Melanesian Reinassance*, Vanuatu kemudian mendukung penuh adanya upaya internasionalisasi isu Papua merdeka. Melalui pembentukan

kebijakan luar negeri mereka serta mengaggas berdirinya organisasi sub-regional kawasan Pasifik guna mengkampanyekan politik Papua merdeka kepada negara – negara Pasifik lainnya dan forum internasional menjadi alat terwujudnya aspirasi kelompok – kelompok kepentingan yang pro terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Wujud serta capaian kepentingan nasional Vanuatu dalam melakukan internasionalisasi isu Papua merdeka menjadi tolak ukur bagi penulis.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif-kualitatif. Tujuannya untuk mengkaji suatu fakta, kemudian memberikan penjelasan terkait realita yang penulis temukan kemudian dibawakan dalam bentuk naratif.⁵³ Penelitian deskriptif digunakan guna mengklasifikasifikasi masalah yang spesifik dan signifikan dalam menyelesaikan suatu rumusan masalah dengan batasan dengan batasan yang jelas serta dibantu dengan kelengkapan studi pustaka. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kepentingan Vanuatu dalam melakukan upaya internasionalisasi isu Papua merdeka.

1.8.2

Jangkauan

Penelitian

⁵³ Soejarsih. Metode Penelitian Kualitatif. 2014.

Periode waktu sebagai jangkauan penelitian yang penulis jadikan capaian ialah tahun 2017 sampai tahun 2020. Vanuatu terhitung melakukan upaya internasionalisasi isu Papua sejak resmi berdirinya organisasi separatisme pro kemerdekaan Papua seperti ULMWP tahun 2014. Kemudian masih terus melakukan serangkaian upaya pengiriman delegasi Papua Barat melalui penyelundupan dan pemalsuan keanggotaan Benny Wenda selaku ketua OPM yang mengatas namakan delegasi dari Vanuatu tahun 2019 – 2020 hingga persidangan PBB.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada pembahasan berikut menggunakan data sekunder sebagai rujukan utamanya. Adapun data sekunder memiliki arti yaitu berbagai informasi oleh penulis dikumpulkan berasal dari penulisan sebelumnya atau telah tertera.⁵⁴ Data tersebut digunakan guna mendukung informasi utama yang telah diperoleh penulis melalui buku atau media cetak lainnya seperti kabar berita hingga tulisan penulis sebelumnya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Pada pembahasan disini penulis menggunakan rujukan Miles Huberman sebagai acuan analisis data. Proses analisis tersebut menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik tersebut memiliki tiga tahapan dalam penyajian analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian penarikankesimpulan.

⁵⁴ (Hasan, 2002:58)

Mereduksi data ini berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, untuk kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya dapat mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan.

Pada proses kedua terdapat penyajian data setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Selanjutnya sebagai langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum valid atau tidak konsisten.

1.8.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan memuat latar belakang deskripsi profil Vanuatu sebagai aktor internasional berupa negara, deskripsi upaya - upaya internasionalisasi isu Papua merdeka yang dilakukan Vanuatu. Lalu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran atau landasan pemikiran yang berkaitan dengan landasan teori dan sintesa pemikiran, serta dilengkapi dengan argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini akan menjelaskan dan menjawab rumusan masalah diantaranya melalui tinjauan pustaka yang menunjukkan Identitas dan Kepentingan Nasional Vanuatu dalam melakukan Internasionalisasi Isu Papua Merdeka tahun 2017 – 2020.

Bab III : Analisis disertai dengan dampak yang dihasilkan dari kepentingan Vanuatu dalam menjadikan *Melanesia Reinassance* menandakan adanya *pemanfaatan* isu hak asasi manusia dan hubungan antar negara Melanesia dalam rangka memberikan keuntungan strategis bagi Vanuatu.

Bab IV : Penutup berupa kesimpulan dan saran.